

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal

- Afriadi. (2015). *Evaluasi Kebijakan Penetapan Kembali Sabang Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas*. Yogyakarta: Magister Perencanaan Kota dan Daerah Universitas Gadjah Mada.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Djunaedi, A. (2018). *Proses Perencanaan Wilayah dan Kota*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Dye, T. R. (1992). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Herdiansyah, H. (2015). *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kamiludin, U., Aryanto, N. C., Pertala, A. W., & Muhammad, Z. (2018). Indikasi Lembah Purba Sebagai Wadah Mineral Plaser dan Unsur Tanah Jarang di Perairan Tanjung BERIKAT dan Sekitarnya, Bangka Tengah, Bangka Belitung. *Jurnal Geologi Kelautan Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan*, 115-124.
- Koryati, N. D., Hidayat, W., & Tangkilisan, H. N. (2004). *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Kurniawati, D. E. (2012). Pendekatan Intermetistik dalam Proses Perubahan Kebijakan: Sebuah Review Metodologis. *Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Malang*, 154-167.
- Loftis, M. W., & Mortensen, P. B. (2018). A Dynamic Linear Modelling Approach to Public Policy Change. *Journal of Public Policy Cambridge University Press*, 553-579.
- Mahi, A. K., & Trigunarso, S. I. (2017). *Perencanaan dan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Depok: Kencana.

- Mayer, R. R. (1985). *Policy and Program Planning a Developmental Perspective*. New Jersey: Prentice Hall.
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya CV.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika*, 65-74.
- Muta'ali, L. (2015). *Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPPG) Universitas Gadjah Mada.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy (Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pierce, J. J., Peterson, H. L., & Hicks, K. C. (2016). Policy Change: An Advocacy Coalition Framework Perspective. *European Consortium for Political Research General Conference* (hal. 1-37). Prague: Charles University.
- Prayoga, G. I. (2017). *Laporan Pengecekan Lapangan Survey Hutan Alam Primer Kawasan Hutan Lindung Pantai Lubuk Besar, Bangka Tengah*. Pangkalpinang: Kerjasama Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi UBB.
- Rifah, N. (2016). *Hotel Resor di Pantai Tanjung Berikat, Bangka*. Semarang: Teknik Arsitektur Universitas Diponegoro.
- Saragih, J. R. (2015). *Perencanaan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudiyono. (2016). Strategi Adaptasi Nelayan Desa Tanjung Berikat dalam Menghadapi Perubahan Iklim. *Jurnal Masyarakat dan Budaya LIPI*, 263-281.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Bersifat: eksploratif, enterpretatif, interaktif dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Tamrin, M. H. (2017). Interaksi Aktor Kebijakan dalam Pengelolaan Wilayah Jembatan Suramadu dalam Perspektif Advocacy Coalition Framework (ACF). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik UMSIDA*, 141-158.

- Tarigan, R. (2015). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wilson, C. A. (2000). *Policy Regimes and Policy Change*. Cambridge University Press, 247-274.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Yuliandhari, R. (2014). *Ketimpangan Spasial Perkotaan Tanah Grogot Kabupaten Paser*. Yogyakarta: Magister Perencanaan Kota dan Daerah.

2. Statistik

- BPS. (2019). *Kabupaten Bangka Tengah Dalam Angka 2019*. Koba: BPS Kab. Bangka Tengah.
- BPS. (2019). *Kecamatan Simpangkatis Dalam Angka 2019*. Koba: BPS Kab. Bangka Tengah
- BPS. (2019). *Kecamatan Namang Dalam Angka 2019*. Koba: BPS Kab. Bangka Tengah
- BPS. (2019). *Kecamatan Koba Dalam Angka 2019*. Koba: BPS Kab. Bangka Tengah
- BPS. (2019). *Kecamatan Sungaiselan Dalam Angka 2019*. Koba: BPS Kab. Bangka Tengah
- BPS. (2019). *Kecamatan Lubukbesar Dalam Angka 2019*. Koba: BPS Kab. Bangka Tengah
- BPS. (2019). *Kecamatan Pangkalanbaru Dalam Angka 2019*. Koba: BPS Kab. Bangka Tengah
- BPS. (2019). *Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung*. Pangkalpinang: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- BPS. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka Tengah Menurut Lapangan Usaha 2014-2018*. Koba: BPS Kab. Bangka Tengah.

- BPS. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Pangkalpinang: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- BPS. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Lapangan Usaha 2014-2018*. Pangkalpinang: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Dokumen Pemerintah

- Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah. (2017). *Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kabupaten Bangka Tengah (Pembangunan Fasilitas Penunjang Wilayah Darat Pada Lahan Seluas 1.100 Ha)*. Koba: Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.
- Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah. (2017). *Penyusunan Masterplan Pelabuhan Utama Tanjung Berikat Kecamatan Lubukbesar Kabupaten Bangka Tengah*. Koba: Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
- Bappenas. (2019). *Rancangan Awal - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024*. Diambil kembali dari bappenas.go.id: <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/rancangan-awal-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-rpjmn-2020-2024/>
- Kementerian Perhubungan. (2017). *Pra Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Laut di Lokasi Kabupaten Bangka Tengah TA 2017*. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Prayoga, G. I. (2017). *Laporan Pengecekan Lapangan Survey Hutan Alam Primer Kawasan Hutan Lindung Pantai Lubuk Besar, Bangka Tengah*. Pangkalpinang: Kerjasama Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi UBB.

4. Peraturan-peraturan dan Keputusan Pemerintah/ Pemerintah Daerah

- Keputusan Bupati Bangka Tengah tentang *Penetapan Lokasi Kawasan Strategis Tanjung Berikat di Kecamatan Lubukbesar Kabupaten Bangka Tengah*, 188.45/620/BAPPEDA-SPM/2015
- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang *Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ±19.131 Hektare, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 10.878 Hektare dan Penunjukkan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 3.120 Hektare di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, SK.798/Menhut-II/2012.
- Keputusan Menteri Perhubungan tentang *Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional*, Nomor KP 414 Tahun 2013.
- Keputusan Menteri Perhubungan tentang *Rencana Induk Pelabuhan Nasional*, Nomor KP 901 Tahun 2016.
- Keputusan Menteri Perhubungan tentang *Rencana Induk Pelabuhan Nasional*, Nomor 432 Tahun 2017.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang *Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain Revisi XV*, 8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2011-2015*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2011-2031*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2016-2021*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang *Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2011-2031*.

- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2034*.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang *Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota*.
- Peraturan Menteri Kehutanan tentang *Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan*, No. P.18/Menhut-II/2011.
- Peraturan Menteri Kehutanan tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan*, No. P.38/Menhut-II/2012.
- Peraturan Menteri Kehutanan tentang *Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan*, No. P.14/Menhut-II/2013.
- Peraturan Menteri Kehutanan tentang *tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan*, No. P.16/Menhut-II/2014.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang *tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan*, No. P.50/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang *Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan*, No. P.27/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2018.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan *tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan*, No. P.7/MENLHK/Setjen/Kum.1/2/2019
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang *Penggunaan Kawasan Hutan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang *Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan*

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang *Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.

5. Artikel internet

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2019. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Proses> pada tanggal 8 Mei 2019

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. 2017. *Artikel: Pemerintah Optimistis Kembalikan Kejayaan Maritim Indonesia*. Diakses dari <https://maritim.go.id/pemerintah-optimistis-kembalikan-kejayaan-maritim-indonesia/> pada tanggal 8 Maret 2020

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. 2017. *Artikel: Presiden Joko Widodo teken Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kelautan Indonesia*. Diakses dari <https://maritim.go.id/presiden-joko-widodo-teken-peraturan-presiden-tentang-kebijakan-kelautan-indonesia/> pada tanggal 8 Maret 2020

_____. <http://www.rakyatpos.com/tanpa-pelabuhan-besar-babel-tak-bisa-maju.html/?page28332434234=234>, diakses tanggal 20 november 2019

_____. <http://humas.babelprov.go.id/content/dpr-dukung-percepatan-pembangunan-pelabuhan-di-babel>, diakses 15 Januari 2020

_____. <https://Rimbakita.com/hutan-primer-dan-hutan-sekunder/> ,diakses 20 januari 2020

_____. <https://bangka.tribunnews.com/2019/07/29/biografi-erzaldi-rosman-djohan-gubernur-bangka-belitung>, diakses 17 februari 2020

_____. <https://bangkatengahkab.go.id/index.php?/halaman/detail/bupati-kabupaten-bangka-tengah>, diakses 17 Februari 2020

_____. <https://bisnis.tempo.co/read/1242050/jembatan-bangka-sumatera-ditolak-dpr-lebih-baik-pelabuhan/full&view=ok>, diakses 17 Februari 2020